

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI BIDANG
PARIWISATA TERKAIT PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU**

*ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH IN THE FIELD OF
TOURISM RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL AUTONOMY IN MAMUJU REGENCY*

MUH. FITRAH HARDIANSYAH

P022191009



SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGANTAR

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI BIDANG
PARIWISATA TERKAIT PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

**Perencanaan dan pengembangan Wilayah
(Otonomi Daerah)**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. FITRAH HARDIANSYAH

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI BIDANG
PARIWISATA TERKAIT PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. FITRAH HARDIANSYAH
P022191009

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof.Dr.H. Cepi Pahlevi

Prof. Dr.Rabinah Yunus, M.Si

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI BIDANG PARIWISATA
TERKAIT PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN
MAMUJU**

Disusun dan diajukan oleh

MUH FITRAH HARDIANSYAH

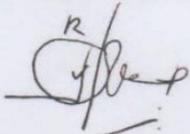
P022191009

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 18 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

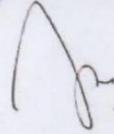
Menyetujui,

Pembimbing Utama



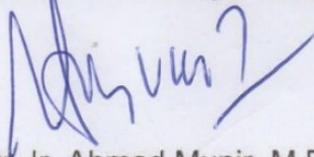
Prof. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si., CSF., CWM
Nip. 19601113 199303 1 001

Pembimbing Pendamping



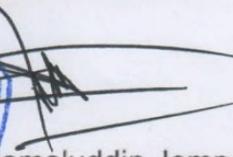
Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.
Nip. 196011231986032001

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
Nip. 196207271989031003

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Nip. 19670308 1990031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Muh. Fitrah Hardiansyah**
Nomor Mahasiswa : P022191009
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah/Otonomi Daerah

Menyatakan dengan sejujurnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,
Yang menyatakan



Muh. Fitrah Hardiansyah

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap kondisi pariwisata di Kabupaten Mamuju.

Kendala yang dihadapi oleh penulis tentu saja ada di dalam penyusunan tesis ini tetapi berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam tulisan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi selaku pembimbing 1 dan Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing 2 atas bantuan dan arahan beliau dimulai dari pengembangan topik terhadap permasalahan penelitian ini, serta sampai pada tahapan pelaksanaan penelitiannya sampai dengan penulisan tesis ini. Terima kasih penulis sampaikan terhadap pihak yang telah banyak men *support* dalam rangka pengumpulan data dan informasi.

Terkhusus istri tercinta, Ardiyanti Arifin ,saya ucapkan banyak terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, do'a atas waktu yang selama ini dapat dimengerti, terkhusus dalam mengasuh dan menjaga si buah hati kami Aisyah Nur Zahira dan Anindita Keiza Zahira sehingga pada penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik. Bapak, Saiful S.IP dan Ibu Heriani terima kasih atas kasi sayang, do'a dan dukungannya dalam setiap Langkah yang penulis ambil.

Kepada adik-adik Rijal Gazali Saiful, Ade Cakra Wardaya, Renaldi Saiful, dan Didit Ariyadi atas dukungan dan bantuannya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya telah bersedia menjadi tempat berbagi segala kerepotan yang penulis lalui selama melaksanakan perkuliahan di 2 (dua) tahun terakhir. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, Rektor Universitas Hasanuddin,
2. Prof. Dr. Ahmad Munir, M.Eng, selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin,
3. Segenap Dosen dan staf administrasi Program Magister Prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin,
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bapak Ali Baal Masdar dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Dr. Muhammad Idris, M.Si yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa bagi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan magister,
5. Pemerintah Sulawesi Barat dalam hal ini SKPD yang telah membantu dalam proses penelitian dan pengambilan data,
6. Rekan-rekan Magister Prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan seangkatan tugas belajar Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan motivasi, bantuan, saran dan masukan kepada penulis selama menjalani studi.

Terakhir terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

MUH. FITRAH HARDIANSYAH. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Bidang Pariwisata Terkait Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh **Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi** dan **Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si**).

Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah di Kabupaten Mamuju dan (2) Menganalisis langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju mengingat kondisi Kabupaten Mamuju merupakan daerah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan yaitu *mix method*. Pengambilan sampel dilakukan dengan observasi dan *deep interview*. Data dianalisis menggunakan analisis korelasi dan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata memiliki hubungan yang kuat dengan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Mamuju dengan angka 0,938 yang berarti mempunyai korelasi sangat kuat serta analisis SWOT yang menunjukkan strategi yang dapat diambil oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pariwisata

ABSTRACT

MUH. FITRAH HARDIANSYAH. Analysis of Economic Growth in the Tourism Sector Related to the Implementation of Regional Autonomy in Mamuju Regency (supervised by **Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi** and **Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si**).

This study aims to determine (1) to analyze the contributing of tourism on regional original income (PAD) in Mamuju Regency and (2) to analyze the steps taken by the government in improving the economy in the tourism sector in Mamuju Regency. This research was conducted in Mamuju Regency considering the condition of Mamuju Regency as the capital of West Sulawesi Province. The method used is the mix method. Sampling was used by observation and deep interview. Data were analyzed using correlation analysis and SWOT analysis.

The results show that tourism has a strong relationship with local revenue (PAD) in Mamuju Regency with a result by 0.938 which means it has a very strong correlation and a SWOT analysis shows strategies that can be taken by the government to increase tourism sector income.

Keyword : Economic Growth, Regional Autonomy, Local Regency Revenue (PAD), Tourism

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGAJUAN | II |
| HALAMAN PERSETUJUAN | III |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | V |
| PRAKATA..... | VI |
| ABSTRAK..... | IX |
| ABSTRACT..... | X |
| DAFTAR ISI | XI |
| DAFTAR TABEL..... | XIII |
| DAFTAR GAMBAR..... | XIV |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Pertanyaan Penelitian | 13 |
| E. Tujuan Penelitian | 13 |
| F. Manfaat Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Pertumbuhan Ekonomi..... | 16 |
| B. Pariwisata | 18 |
| C. Otonomi Daerah..... | 22 |
| D. Pandangan Baru Pembangunan Kepariwisataaan | 23 |
| E. Kondisi Kepariwisataaan Indonesia Era Otonomi Daerah | 25 |
| F. Asas Desentralisasi Fiskal | 32 |
| G. Penelitian terdahulu | 34 |
| H. Kerangka Pikir..... | 37 |
| BAB III Metode penelitian..... | 39 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 39 |
| B. Jenis Penelitian | 39 |

| | |
|--|-----------|
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| D. Populasi dan Sampel | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 46 |
| 1. Analisis deskriptif..... | 46 |
| 2. Uji Validitas dan Realibilitas Data..... | 47 |
| 3. Uji Korelasi | 47 |
| 4. Analisis SWOT | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Uji Validitas dan Realibilitas | 53 |
| 1. Uji Validitas | 53 |
| 2. Uji Realibilitas | 54 |
| B. Analisis Korelasi Variabel Penelitian | 55 |
| C. Analisis SWOT..... | 57 |
| 1. Faktor Internal..... | 57 |
| 2. Faktor Eksternal..... | 66 |
| 3. Matriks IFE..... | 68 |
| 4. Matriks EFE | 69 |
| 5. Matriks Internal dan Eksternal (IE)..... | 70 |
| 6. Analisis Matriks SWOT | 71 |
| D. Pembahasan..... | 77 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|---|-------------------------------------|
| 1. Jumlah Destinasi Wisata Kabupaten Mamuju | 5 |
| 2. PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2016-2019..... | 8 |
| 3. Jumlah Wisatawan (Orang) Per Tiga Tahun terakhir | 9 |
| 4. Variabel Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Perkembangan Pengunjung Objek Wisata 2015-2019 | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|-------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pikir | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk membangun suatu daerah. Dalam rangka pembangunan daerah dibutuhkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar dan memerlukan sumber dana yang dapat diandalkan. Krisis moneter serta ambruknya perekonomian memicu perlawanan terhadap pemerintahan orde baru yang dimulai pada awal tahun 1998 untuk menuntut reformasi yang nyata, seperti demokrasi dan desentralisasi.

Gelombang reformasi tersebut menjadi pendorong disahkannya kerangka hukum baru mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang sekarang berubah menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Otonomi daerah membawa pengaruh positif bagi setiap daerah, yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan

perundang-undangan, asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Bash, 2015).

Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah untuk memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang nantinya akan meningkatkan perekonomian nasional. Seperti halnya desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah, tuntutan reformasi akan keadilan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat daerah dapat terwujudkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya melalui prinsip *Money Follos Functions* (Kharisma, 2013). Otonomi daerah ini memberikan kemudahan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat memberikan perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, salah satunya di bidang ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan akan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka

semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pembangunan ekonomi yang dimana merupakan suatu proses perubahan mendasar terhadap struktur sosial, selain itu pembangunan ekonomi dapat juga mengatasi ketimpangan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan. Adanya keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan memperhatikan nilai pokok seperti, adanya perkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Arsyad, 2014), sehingga pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per-kapita karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang dimana nantinya pada pembangunan ekonomi dapat memberikan pencapaian terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya berperan langsung untuk dapat lebih berkreasi dalam menggali potensi-potensi, sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal membuat lapangan kerja baru, Dengan diketahuinya sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunannya, di mana merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di daerah, dimana salah satunya dari sektor pariwisata yang menjadi andalan pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat dijadikan alat pengembangan potensi daerah, seperti halnya transportasi, akomodasi, jasa, atraksi yang akan menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, sektor pariwisata dapat memberikan pengaruh terhadap daerah seperti meningkatkan peran beberapa sektor pendukung di pemerintah maupun swasta seperti biro perjalanan wisata, industri kerajinan/cendera mata dan daya tarik wisata, hotel, restoran dan juga sumber daya manusia. Oleh karena itu, dengan melihat manfaat sektor pariwisata, dapat dikatakan bahwa pariwisata memiliki potensi untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dapat dimanfaatkan daerah sebagai pendorong untuk memberikan pergerakan terhadap perekonomian suatu daerah.

Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan harapan pemerintah daerah yang dimana akan memberikan dampak yang baik terhadap daerah, salah satunya Kabupaten Mamuju, salah satu daerah yang juga mengharapkan hal tersebut. Oleh karena itu, Kabupaten Mamuju yang

sampai saat ini mencoba bergerak di bidang pariwisata dikarenakan kondisi Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang belum lama terbentuk menjadi ibu kota provinsi Sulawesi barat, yang sampai saat ini Kabupaten Mamuju masih berstatuskan Kabupaten belum beralih menjadi kota madya. Dimana Kabupaten Mamuju diapit oleh pantai dan perbukitan berlapis cokelat, sehingga Hampir sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir yang dengan melihat keindahan pesisir pantainya yang dihiasi oleh deretan kapal nelayan khas Mandar menambah indahnnya panorama alamnya. Adapun Kabupaten Mamuju memiliki beberapa kawasan wisata sebagai berikut :

Table 0.1 Jumlah Destinasi Wisata Kabupaten Mamuju

| NO. | JENIS WISATA | OBJEK WISATA |
|------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | WISATA ALAM | Pulau Karampuang |
| 2 | | Permandian So'do |
| 3 | | Bone Tangnga |
| 4 | | Air Terjun Tamasapi |
| 5 | | Pantai Mangrove Bebanga |
| 6 | | Air Terjun Botteng |
| 7 | | Goa Saletto |
| 8 | | Pantai Pasir Putih Ngalo |
| 9 | | Pantai Lombang-lombang |
| 10 | | Air Panas Passiangan |
| 11 | WISATA BUDAYA | Rumah Adat Mamuju |

| | | |
|----|----------------------|---------------------------|
| 12 | | Museum Kabupaten Mamuju |
| 13 | WISATA BUATAN | Anjungan Pantai Manakarra |
| 14 | | Anjoro Pitu |
| 15 | | Gentungan |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (MAMUJU, 2020)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa ada lima belas objek wisata yang saat ini menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Mamuju yang dijadikan tempat berwisata dan menghabiskan waktu bersama keluarga pada hari libur. Pariwisata Kabupaten Mamuju sampai saat ini jika dilihat dari jumlah objek wisata yang dimana dapat menjadi potensi terhadap peningkatan perekonomian kepada masyarakat pada umumnya dan Kabupaten Mamuju khususnya.

Pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari bagaimana kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, sehingga pada lima belas objek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, hanya ada empat destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Mamuju, sedangkan sisanya dikelola oleh masyarakat yang memiliki lahan yang dijadikan sebagai objek wisata. Sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju dengan memfokuskan pada empat tujuan pariwisata yang terdapat pada Kabupaten Mamuju yaitu permandian So'do, Pulau Karampuang, rumah adat mamuju, air terjun Tamasapi.

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 dijelaskan bahwa, salah satu tujuan dan sasaran misi Kabupaten Mamuju adalah menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah pengembangan pariwisata dan budaya.

Tabel 0.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju (PAD) 2015 - 2017

| No. | Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. | 2015 | 50,560,809,000.00 |
| 2. | 2016 | 59,253,400,000.00 |
| 3. | 2017 | 75,634,662,000.00 |
| 4. | 2018 | 80,353,572,874.00 |
| 5. | 2019 | 111.994.921.997.00 |

Sumber : mamujukab.bps.go.id, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Mamuju dari 2015-2019 mengalami kenaikan yang signifikan bahkan selama 4 tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Potensi ini menandai bahwa semakin berkembangnya perekonomian di tempat tersebut karena sumber pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.

Kabupaten Mamuju dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dari

sektor pariwisata masih belum maksimal, dikarenakan pada sektor pariwisata hanya mampu direalisasikan kurang lebih 50% dari target yang telah direncanakan bahkan hanya 25% realisasinya pada tahun 2019, seperti yang di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 0.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2016 - 2019

| No | Tahun | Target | Realisasi | % |
|-----------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2015 | 150.000.000,00 | 76.425.000 | 50,95 |
| 2 | 2016 | 150.000.000,00 | 80.125.000,00 | 53,42 |
| 3 | 2017 | 150.000.000,00 | 81.200.000,00 | 54,13 |
| 4 | 2018 | 102.000.000,00 | 67.355.000,00 | 66,03 |
| 5 | 2019 | 150.300.000,00 | 37.950.000,00 | 25,25 |

Sehingga dari data di atas, realisasi pertahun terkait pariwisata di Kabupaten Mamuju dilihat dari lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dan pencapaiannya hanya memberikan kontribusi setengah dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, sampai saat ini pertumbuhan ekonomi bidang pariwisata masih belum banyak yang menyadari akan keberhasilan suatu daerah apabila dijadikan tolak ukur pembangunan ekonomi, dikarenakan pariwisata dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk berkunjung ke suatu daerah, seperti halnya di Kabupaten Mamuju dilihat dari data badan pusat statistik jumlah kunjungan wisatawan domestik masih lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan manca negara, seperti yang di jelaskan pada table berikut ini :

Table 0.4 Jumlah Wisatawan (Orang) 2015-2019 Kabupaten Mamuju

| Tahun | Domestik | Mancanegara | Jumlah |
|-------|----------|-------------|--------|
| 2015 | 21.919 | 9 | 21.928 |
| 2016 | 24.300 | 14 | 24.314 |
| 2017 | 16.339 | 61 | 16.400 |
| 2018 | 15.030 | 70 | 15.100 |
| 2019 | 16.642 | 42 | 16.684 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (MAMUJU, 2018)

Sehingga jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamuju dari tahun 2015-2019 mengalami hal yang fluktuatif, dimana pada tabel di atas pada tahun 2016 merupakan puncak dari kunjungan wisatawan domestik dan jika dilihat lebih jelas wisatawan domestik lebih mendominasi dibanding wisatawan asing yang berkunjung. Di lain sisi, wisatawan mancanegara yang berkunjung dari 2015-2018 mengalami peningkatan sedangkan 2019 mengalami penurunan.

Pada penelitian Khoir, Ani, & Hartanto, (2018) menemukan bahwa komitmen area industri perjalanan untuk pembayaran unik provinsi yang berubah setiap tahun, meskipun pembayaran secara konsisten dari area industri perjalanan secara konsisten meningkat. Berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Yanti & Hadya, (2018), dimana didapatkan hasil menunjukkan jumlah wisatawan, retribusi objek wisata memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Padang. Mardianis Burhan & Syartika, (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan

sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten kerinci kedepannya. Singka, (2011), menemukan bahwa kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Baubau masih rendah, sedangkan pengelolaan potensi pariwisata yang dilakukan pemerintah Kota Baubau masih kurang optimal.

Dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dimana masing-masing daerah, tidak semua pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Namun jika dilihat dengan adanya otoda yang dimana daerah memiliki peluang besar bagi daerah dalam memajukan perekonomian di daerah, dengan lebih berkreasi menggali peluang dan potensi yang terdapat di daerah salah satunya di sektor pariwisata, di mana pariwisata bisa memikat wisatawan lokal maupun mancanegara yang nantinya juga pariwisata dapat mendapatkan pengaruh positif terhadap masyarakat.

B. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata terkait penyelenggaraan otonomi daerah telah dilakukan oleh banyak orang berdasarkan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu pada umumnya menggunakan variabel pariwisata yang memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap PAD. Beberapa penelitian mengambil objek penelitian yang dimana daerah tersebut tidak memiliki kontribusi besar dari sektor pariwisata dan mampu diandalkan sebagai sektor utama. Sedangkan adanya otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menopang kemajuan ekonomi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan *mix method* sehingga diharapkan hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih komperhensif dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan.

Perbedaan lain pada penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yakni Kabupaten Mamaju dimana kabupaten ini baru berdiri dan memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dengan rentang waktu dari tahun 2015-2019 dengan kebijakan desentralisasi yakni otonomi daerah serta variabel yang akan diteliti yaitu, pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh pendapatan asli daerah (PAD) serta menggunakan pendekatan *mix method* dalam analisis data yang membuat hasil penelitian lebih mendalam.

C. Rumusan Masalah

Pelaksanaan otda terfokus pada peletakkan kewenangan kabupaten dan kota, maka menarik untuk menelusuri faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pariwisata, dimana salah satu indikator yang digunakan yaitu retribusi yang di pungut dari Pariwisata. Oleh sebab itu, mengkaji pertumbuhan ekonomi sektor

pariwisata di Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utamanya dari sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju.

Dilihat dari kondisi kabupaten Mamuju yang memiliki lima belas destinasi wisata dimana dikelompokkan menjadi tiga model destinasi wisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan yang dimana total keseluruhan destinasi wisata di Kabupaten Mamuju berjumlah 15 destinasi wisata. Jika dalam hal melihat kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju sampai saat ini hanya ada empat destinasi wisata yang dapat di ukur dikarenakan hanya ke empat destinasi ini yang dikelola pemerintah Kabupaten Mamuju. Di lain sisi banyaknya pariwisata yang bermunculan namun pengelolaanya secara langsung di kelola oleh pihak swasta, maka dengan ini pemerintah dalam menyikapi hal tersebut sebagaimana berupaya meningkatkan perekonomian di kabupaten Mamuju.

Di samping Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dari tahun ke tahun semakin berkurang, hal ini terbukti dari empat tahun terakhir dimana industri travel cukup siap untuk memberikan kontribusi porsi yang besar dari target persen. Di lain sisi jika dilihat dari kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan dimana kunjungan wisatawan domestik lebih mendominasi di banding kunjungan wisatawan mancanegara, namun kunjungan domestik tiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan wisatawan manca negara

mengalami peningkatan walaupun jumlahnya masih sangat kecil di banding wisatawan domestik yang berkunjung.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap peningkatan perekonomian di sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju?

E. Tujuan Penelitian

Menganalisis pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan bagaimana kaitanya dengan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten mamuju dengan cara :

- a. Menganalisis kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah di Kabupaten Mamuju;
- b. Menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju;
- c. Menganalisis pengembangan sektor pariwisata untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Mamuju.

F. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pada penelitian ini nantinya memberikan bukti empiris terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, dan kaitanya dengan penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan khususnya tentang peningkatan perekonomian di skala Kabupaten yang bersumber dari sektor pariwisata di era otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi terhadap penyedia kajian data dan informasi karakteristik tentang pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan nantinya bisa dijadikan input (masukan) pada pemerintah kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana jumlah barang dan jasa dapat diperoleh dengan jumlah pekerjaan yang sama meningkat dari waktu ke waktu de la Croix, (2015), yaitu memberikan pandangan dengan melihat kenaikan jumlah barang dan jasa dengan jumlah pekerjaan yang meningkat dan menitik beratkan pada proses. Untuk dapat menciptakan keberhasilan suatu daerah yaitu dengan cara memperhatikan salah satu indikator dengan melihat kondisi laju pertumbuhan ekonominya (Subardini, 2018)

Transformasi fundamental ekonomi, mulai dari struktur sektoralnya, hingga susunan demografis dan geografisnya, dan mungkin yang lebih penting, hingga seluruh struktur sosial dan kelembagaannya, dan juga masih banyak hal yang tidak diketahui yang menjadi tantangan utama sehingga daerah tersebut telah menarik aktivitas intelektual yang hebat dan kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan (de Gregori & Kuznets, 1967). Seperti halnya di sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena pariwisata merupakan posisi strategis dalam perekonomian nasional. Maka pembangunan sektor pariwisata harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan pendayagunaan seluruh sumber dan potensi kepariwisataan yang ada serta menggali sumber-sumber baru, disamping itu berbagai komponen

sektor yang terkait dengan sektor kepariwisataan dapat diandalkan untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui devisa, memperluas dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat mendorong pembangunan daerah dalam menghadapi era globalisasi (Nizar, 2011).

Kontribusi tidak langsung berasal dari pajak dan bea yang dikenakan pada barang dan jasa yang disediakan untuk wisatawan, melainkan kontribusi langsung dihasilkan oleh pajak atas penghasilan dari pekerjaan pariwisata dan bisnis pariwisata, dan oleh pungutan secara langsung datangnya dari turis seperti pajak keberangkatan, lapangan pekerjaan yang signifikan meningkat dapat terjadi akibat adanya ekspansi pariwisata internasional (Nizar, 2011). Lapangan pekerjaan secara langsung yang dihasilkan melalui hotel, restoran, klub malam, taksi, dan penjualan souvenir dan secara tidak langsung melalui pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh bisnis terkait pariwisata.

Dimana teori Joseph Alois Schumpeter dalam buku berjudul *Theory of Economic Development* mengemukakan pandangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan output masyarakat yang berdampak terhadap semakin tingginya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan terhadap produksi itu sendiri (Schumpeter & Backhaus, 2006). Dimana dengan melihat pandangan pada teori tersebut merupakan suatu pandangan dari segi keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperlancar suatu proses

pembangunan ekonomi dengan lebih giat mencari inovasi-inovasi baru yang terkait di dalam pembangunan ekonomi. Pada teori ini inovasi yang dimaksud ialah perbaikan terhadap “teknologi” misalnya dalam lingkup lain seperti penemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi berupa proses penambahan output dalam waktu yang lama dengan memperhatikan aspek seperti: Pertama, proses jangka Panjang dan output perkapita, kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang berkelanjutan, ketiga, dengan melihat perubahan yang terjadi pada perekonomian dari waktu ke waktu. (Boediono, 1999). Pada pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dikarenakan output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan memperhatikan adanya perubahan pada output total di satu pihak, dengan jumlah penduduk di pihak lain.

B. Pariwisata

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, dikatakan bahwa Pariwisata merupakan berbagai macam wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah sebagai usaha untuk memberikan kenyamanan kepada dirinya dengan pencapaian ingin mengetahui atau menggali pengetahuan baru dengan cara melakukan

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, yang sifatnya sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok (Subardini, 2018).

Adanya kesulitan dalam membedakan antara berpergian untuk besenang-senang, bisnis, belajar dan lain sebagainya. Sehingga pariwisata di definisikan sebagai sebuah fenomena yang tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh penghasilan baik secara permanen atau sementara yang dilakukan dengan perjalanan dan tinggal untuk sementara waktu atau berpergian keluar ("Relationship of Economic Growth with Tourism Sector," 2016). Sementara secara umum yang dimana pariwisata adalah sebagai tujuan mencari keseimbangan atau keserasian dan kepuasan dengan iklim dalam aspek sosial, sosial, normal, dan logis yang mungkin dilakukan dengan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, namun bersifat singkat, dilakukan secara eksklusif atau dalam pertemuan, (Kanisius, 1987). Pariwisata pada hakekatnya berhubungan langsung dengan empat usaha pengembangan pariwisata yang dimana meliputi ekonomi, social, budaya dan lingkungan hidup (Subardini, 2018). Dr. James J.Spillen yang dimana pariwisata pada buku yang berjudul "EKONOMI PARIWISATA" ini di bagi dalam tiga kategori yang dimana dikenal dengan pariwisata dalam negeri (*domestic tourism*), pariwisata nasional (*national tourism*), pariwisata internasional (*international Tourism*), Kanisius, (1987). Pada ke tiga kategori pariwisata tersebut yang sangat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pada

pariwisata internasional dimana kedatangan touris mancanegara dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan wisatawan pada suatu obyek wisata seperti yang dijelaskan oleh Kumala et al, (2017) yaitu faktor yang pertama, faktor rasional, meliputi sumber-sumber wisata, kondisi lingkungan, fasilitas wisata, susunan kependudukan, situasi politik dan keadaan geografis. Sehingga dalam meningkatkan dunia pariwisata merupakan peranan penting masyarakat, yang kemajuan pariwisata itu harus di imbangi dengan ekonomi masyarakat. oleh karena itu perlunya peningkatan pariwisata dengan meningkatkan partisipasi masyarakat harus dilakukan dengan cara meningkatkan kemajuan daerah wisata. Sedangkan faktor yang kedua, yaitu Faktor irrasional (dorongan bawah sadar) yang meliputi tingkah laku *prestise*, pengaguman pribadi, lingkup pergaulan dan ikatan keluarga, perasaan-perasaan keagamaan, hubungan masyarakat dan promosi pariwisata, iklan dan penyebaran serta kondisi ekonomi (pendapatan dan biaya).

Dalam menghadapi tantangan dan peluang telah dilakukan perubahan peran pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat berkembang dengan pesat, sehingga diasumsikan bahwasanya pariwisata merupakan bagian yang

tidak dipisahkan dari kehidupan manusia terutama dalam sosial dan ekonomi, Kumala, Soelistyo, & Nuraini, (2017).

Manfaat dari pariwisata yang dapat di rasakan oleh beberapa sektor yang mungkin dapat merasakan yaitu manfaat ekonomi pariwisata di puji oleh berbagai industry karena berbagai alasan. Klaim signifikan ekonomi pariwisata memberi industri penghargaan yang lebih besar di antara komunitas bisnis dan pejabat publik. Keputusan masyarakat atas pariwisata sering kali melibatkan antara pro dan kontra masyarakat yang dengan melihat manfaat dan kerugian yang di timbulkan oleh industry pariwisata (Icoz & Icoz, 2019). Oleh karena itu masyarakat perlu memahami kepentingan relative pariwisata bagi daerah mereka, termasuk kontribusi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Menyimpulkan dari berbagai iteratur, yang dimana penentuan hubungan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu: dilihat dari besaran kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan penerapan tenaga kerja, kemudian melihat peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pemerintah (Nizar, 2011).

C. Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang dijelaskan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya seperti, penetapan kebijakan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggung jawaban daerah sendiri (Aser, 2005).

Dilihat pada masa sebelum otonomi daerah, dimana daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sedangkan banyak sekali kewenangan pemerintah diatur oleh pusat. Sehingga adanya otonomi daerah membawa pengaruh positif bagi daerah, dikarenakan wewenang pemerintah daerah semakin besar seperti dalam bidang pemerintahan. Prinsip memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah prinsipnya sebagai pembantuan pusat dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Oleh karenanya pemerintah dan masyarakat dapat mengelolah sumber daya yang ada dengan cara membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru sehingga dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2014).

D. Pandangan Baru Pembangunan Kepariwisata

Pariwisata sering dilihat potensi ekonomi penghasil pendapatan bagi pembangunan ekonomi disuatu negara yang berlaku juga di Indonesia tapi secara mendasar kepariwisataan memiliki tujuan pembangunan yang lebih luas. Pembangunan pariwisata pada prinsipnya untuk :

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Mengembangkan kecintaan kepada negara dengan perjalanan wisata yang dilaksanakan oleh warga negara destinasi wisata di Indonesia. Dengan demikian semakin banyaknya masyarakat yang bepergian ke tempat wisata akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional dan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia.

2. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Pariwisata menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahan, sedikit sekali sumber daya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Dari hal ini dapat diprogramkan pada pembangunan yang berkesinambungan.

4. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pariwisata Indonesia terkenal dengan kekayaan budayanya yang tidak dimiliki oleh negara lain, hal ini dapat menjadi kelebihan yang dapat dimaksimalkan sehingga pembangunan berlandaskan budaya setempat mesti sejalan dengan pembangunan secara umum untuk tetap melestarikan budaya yang telah terbentuk dalam waktu yang lama pada suatu destinasi wisata.

5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada saat ini telah berubah menjadi sebagai sebuah kebutuhan dasar pada masyarakat modern. Hal tersebut tentu bisa menjadi faktor pendorong pariwisata berkembang lebih baik ke depannya.

6. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Manajemen kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan wajib memberikan kesempatan bertumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam hal kegiatan pariwisata akan memberikan dampak kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan manajemen pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

7. Pengembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin maju tentu berimbas pada dunia pariwisata sehingga tingkat persaingan dalam memilih destinasi wisata

merupakan keniscayaan yang saat ini terjadi untuk itu pengelolaan pariwisata harus mengadaptasi hal tersebut dan mengintegrasikan ke dalam masyarakat sekitar.

E. Kondisi Kepariwisata Indonesia Era Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada masa lalu lebih diprioritaskan pada area barat Indonesia. Perihal ini nampak lebih bertumbuhnya pembangunan alat serta infrastruktur di wilayah barat Indonesia, dibanding dengan yang ada di area timur. Perihal ini serta tampak dari pembangunan di zona pariwisata, dimana area pulau Jawa dan Bali jadi area fokus penting pembangunan kepariwisataan. Kualitas sumber daya alam bisa dijadikan daya tarik wisata favorit di area timur Indonesia, karena potensinya lebih bagus dan masih alami serta mempunyai kesempatan yang besar untuk dibesarkan. Namun pada kenyataannya area timur Indonesia menemui beberapa kendala, seperti dukungan sarana dan prasarana, kemampuan SDM serta sejenisnya. Beberapa akibat yang diakibatkan dari ketimpangan ini antara lain :

1. Pembangunan objek pariwisata tidak tersebar secara rata, khususnya di bagian timur, sehingga pertumbuhan dari sektor ini masih rendah.
2. Masih terfokus pada sektor pariwisata yang terkenal, yaitu Pulau Bali.
3. Perencanaan pariwisata di timur Indonesia belum terlalu matang serta kurang optimalnya memanfaatkan potensi objek pariwisata yang belum terekspos.

4. Rendahnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang terbangun.
5. Transportasi belum tersedia secara maksimal dalam menjangkau objek wisata tersebut.

Di masa otonomi daerah saat ini terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan kepariwisata di Indonesia, antara lain :

Isu penting pertama, dalam era aplikasi otonomi daerah pada zona pariwisata ialah munculnya rivalitas antar wilayah, kompetisi pariwisata yang bukan membidik pada kenaikan komplementaritas serta pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini diakibatkan oleh sebagian faktor seperti: a. lemahnya uraian mengenai pariwisata b. lemahnya kebijaksanaan pariwisata wilayah c. tidak terdapatnya prinsip dari pemerintah pusat ataupun provinsi. Akhirnya pengembangan pariwisata wilayah semenjak era otonomi lebih diamati dengan cara sebagian. Maksudnya banyak wilayah meningkatkan pariwisatanya tanpa memandang, mengaitkan serta apalagi campur tangan dengan peningkatan daerah yang berdampingan atau wilayah terdekat atau lokal atau kota. Selain itu, memperluas persaingan antar lokal, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi item yang didapat. Sementara itu pengembangan pariwisata sepatutnya rute Provinsi ataupun rute kabupaten/kota, apalagi tidak tidak lagi memahami batasan sebab perkembangan teknologi informasi.

Isu kedua, mengenai situasi proses pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang berfokus hanya pada wilayah wisata khusus saja,

meski tempat di daerah lain mempunyai keanekaragaman dalam kemampuan kepariwisataan. Hal yang penting juga dari konsentrasi aktivitas pariwisata ini merupakan dengan telah terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di bermacam posisi, sedangkan posisi yang lain tidak bertumbuh begitu juga mestinya. Selain itu, fitur dan kualitas atraksi dan wisata yang ditawarkan belum menjadi daya tarik bagi kehadiran wisatawan asing, karena barang yang ditawarkan tidak dikemas seperti yang diharapkan dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing. Salah satu kekurangan produk industri perjalanan Indonesia, yang menyebabkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara tetangga, khususnya tidak adanya peningkatan produk dan sifat administrasi industri perjalanan Indonesia. Penghibur industri travel Indonesia kurang memberikan pertimbangan yang cukup untuk mengembangkan barang-barang baru yang lebih serius dan sesuai dengan pendapatan pasar.

Isu ketiga, diidentikkan dengan berbagai kondisi dan situasi lokal, baik dalam hal biasa kemampuan industri perjalanan, ekonomi, tradisi sosial, pekerjaan, populasi dan sebagainya yang memerlukan desain kemajuan yang khas, baik dalam hal strategi atau teknik, kebutuhan, atau pengaturan. Teknik untuk menentukan contoh perbaikan ini membutuhkan pekerjaan yang berfungsi dari semua kelompok, sehingga integratif, jauh jangkauan dan sinergis.

Isu keempat, bisa diamati dari banyaknya wilayah tujuan wisata yang amat potensial di Indonesia bila diamati dari bagian daya tarik alam serta adat yang dimilikinya. Tetapi sayangnya belum dapat dijual ataupun sanggup bersaing dengan daerah-daerah tujuan wisata bagus di area regional ataupun global. Perihal itu karna daya tarik yang ada belum dikemas dengan cara handal, kurangnya kualitas jasa yang didapatkan, pemahaman adat ataupun alam yang belum mencukupi, ataupun sebab belum dibentuknya gambaran (*image*) yang menjadikan turis terpicat untuk datang mendatangi serta lain lainnya. Melipatgandakan ragam kegiatan kepariwisataan terkini berlandas sumber daya alam, dengan prinsip perlindungan area serta peran serta warga, merupakan strategi yang ditempuh guna menambah penggunaan keunikan wilayah serta kompetisi di tingkatan regional. Tidak hanya mutu kemasan serta jasa, produk pariwisata berbasis alam wajib membagikan pengalaman lebih pada turis. Berikutnya, pembentukan produk wisata serta pemasarannya, mestinya menggunakan teknologi terbaru. Produk wisata yang dipromosikan wajib telah berplatform teknologi informasi yang handal, sebagai usaha menambah pelayanan serta dan juga menaikkan keterampilan menerobos pasar global.

Disamping situasi yang dibahas sebelumnya, beberapa tetap ditemui masalah dalam program pengembangan industri pariwisata di negara kita. Hal yang sangat penting dari penanaman modal merupakan "*High Investment, Not Quick Yield*" maksudnya pemodal di aspek pariwisata

menginginkan pemodalannya yang jumlah besar dengan waktu pengembalian yang membutuhkan waktu jangka panjang. Situasi ini kurang menarik untuk para investor yang masih mempunyai budaya "*Instant and Shortcut*" dimana mereka lebih menggemari melaksanakan pendanaan yang bisa segera membagikan profit. Akibatnya para penanam modal tidak tertarik menanamkan modalnya dalam meningkatkan upaya pariwisata. Dalam kondisi ini diperlukan integrasi upaya pariwisata (*tourism business integration*) yang ialah sinergi pelaku kepariwisataan dengan cara horisontal ataupun vertikal serta membagikan profit ataupun manfaat untuk masing-masing pihak. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk-bentuk insentif yang sanggup memicu timbulnya pemodalannya di aspek kepariwisataan dengan memakai manajemen partisipatoris dengan mengaitkan semua stakeholders baik warga, dunia usaha, lembaga finansial, pemerintah wilayah (Provinsi, Kabupaten ataupun Kota) dan pemerintah pusat.

Guna mengatasi bermacam permasalahan serta kemampuan yang sudah dikatakan di atas dengan senantiasa mengarahkan pada arah kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan yang sudah dikatakan, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang berbasis pada strategi :

1. Kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*) merupakan upaya pemerintah dalam bidang perpajakan maupun pemberian insentif dan kemudahan aturan dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Kebijakan Investasi (*Investment Policy*) upaya yang dilakukan dengan memberikan regulasi yang memudahkan investor dalam melakukan investasi pada suatu daerah.
3. Pengembangan Infrastruktur dalam mendukung sektor pariwisata agar mudah dijangkau oleh semua pihak.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai program yang dilakukan.
5. Koordinasi Lintas Sektor, kerjasama antar sektor maupun dinas pemerintahan terkait dengan bersama-sama membuat suatu kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Semua kondisi tersebut yang telah dibahas di atas membutuhkan pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan keunggulan daya saing (*competitive advantage*) yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan seperti dalam Michael E. Porter (2004) :

1. *Cost Advantages*

Keunggulan terhadap biaya yang ditetapkan jika suatu destinasi wisata mempunyai keunggulan ini maka wisatawan pasti akan tertarik berkunjung ke lokasi tersebut.

2. *Differentiation*

Dimana pembedaan konsep destinasi wisata harus mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan tempat lain misalnya kawasan Indonesia timur terkenal dengan kekayaan laut atau wisata bahari

berbeda konsep dengan yogyakarta yang mempunyai keanekaragaman budaya masyarakat setempat.

3. *Business Linkages*

Membangun konektifitas antar sesama lini bisnis sehingga sektor pariwisata dapat berjalan dengan optimal dan melibatkan serta menguntungkan banyak pihak.

4. *Services*

Pelayanan merupakan hal mutlak dimiliki jika ingin bersaing apalagi negara lain telah mengkampanyekan pelayanan yang optimal ini bisa dikatakan semakin baik pelayan pada destinasi wisata maka potensi untuk menjadi prioritas wisatawan akan semakin besar.

5. *Infrastructure*

Faktor yang tidak kalah penting yakni dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung objek wisata karena sebuah keniscayaan walaupun destinasi tersebut bagus namun jika tidak didukung oleh kantor dan kerangka kerja yang bagus tidak akan memberikan hasil yang paling ekstrem.

6. *Technology*

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah merambah ke sektor pariwisata, kemudahan mengakses penginapan, transportasi dan lembaga keuangan akan memberikan *impact* yang besar bagi pengembangan kepariwisataan.

7. *Human Resources*

Faktor kemampuan SDM dalam memanfaatkan potensi pariwisata harus ditingkatkan seperti manajemen pariwisata, penguasaan bahasa asing dan *costumer service* wajib dilakukan.

F. Asas Desentralisasi Fiskal

Dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah terdapat suatu kerangka yang disebut dengan desentralisasi moneter yaitu kemampuan untuk mengelola dana daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Desentralisasi Keuangan adalah penyerahan kewajiban dan penggunaan kekuatan dan wewenang administrasi negara tetangga dalam menentukan pilihan di bidang moneter yang mencakup bagian dari sudut pendapatan dan konsumsi. Desentralisasi moneter secara tegas diidentikkan dengan kewajiban dan unsur-unsur pemerintahan yang dijalankan negara tetangga dalam pengaturan tenaga kerja dan produk-produk publik (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi dari sudut pandang penilaian adalah kemandirian moneter yang menggabungkan pemberian tugas pendapatan dan tugas konsumsi, yang memungkinkan suatu daerah untuk mengarahkan dan meningkatkan sumber pendapatan dan meningkatkan sumber pendapatan teritorial. Upaya desentralisasi berfungsi dimana untuk meningkatkan saham dalam system politik, dengan cara lebih memperhatikan akan peningkatan stabilitas politik dan persatuan nasional sehingga memungkinkan populasi yang berbeda dalam mengambil bagian dan

memanfaatkan keadaan dalam pengambilan keputusan (Seymour & Turner, 2002). Untuk mengatasi keterbatasan perencanaan nasional maka pendelegasian wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah, diarahkan ke pendekatan kepada masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Upaya pemerintah pusat memberikan pelimpahan sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan kepada daerah yang diistilahkan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah membiayai pelaksanaan fungsi tersebut dengan membebankan kepada pendapatan asli daerah yang didapatkan setiap daerah. Namun pada implementasinya di lapangan pemerintah daerah memiliki batasan dan masalah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan atau program daerah dan maka solusi yang diberikan yaitu subsidi yang berasal dari pemerintah pusat yang dibutuhkan sebagai upaya mendorong pembangunan pariwisata di daerah. Sehingga otonomi daerah diharapkan memberikan perubahan kepada pertumbuhan ekonomi di daerah, untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

G. Penelitian terdahulu

Dilihat dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Bidang Pariwisata terkait Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju”, yang nantinya memberikan titik terang terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dimana penelitian tentang pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata sampai saat ini telah dilakukan oleh banyak orang sehingga berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 0.5 Penelitian terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Metode | Parameter | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 1. | Nizar, (2011) | Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Model VAR | 1. Sektor Pariwisata 2. Pertumbuhan Ekonomi | Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kasual timbal balik. |
| 2. | Yanti & Hadya, (2018) | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang | Analisis Korelasi | 1. Sektor Pariwisata 2. Peningkatan PAD | Hasil penelitian menunjukkan jumlah wisatawan , retribusi objek wisata memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Padang |
| 3. | Singka, (2011) | Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bau-Bau | Penelitian Deskriptif Kualitatif | 1. Potensi Pariwisata 2. Otonomi Daerah | Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Baubau masih rendah, sedangkan pengelolaan potensi pariwisata yang dilakukan pemerintah Kota Baubau masih kurang optimal |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| 4. | Pujiati, (2008) | Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal | Regresi Menggunakan Data Panel | 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Fiskal | Pendapatan daerah, bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil pajak, dan tenaga kerja memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Regional di Kabupaten |
| 5. | Khoir et al., (2018) | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember | Analisis proporsionalitas | 1. Sektor Pariwisata 2. PAD | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif, meskipun setiap tahunnya pendapatan dari sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan. |
| 6. | Mardianis Burhan & Syartika, (2018) | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kerinci | Location Quotient | 1. Sektor Pariwisata 2. PAD | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten kerinci kedepannya. |
| 7. | FRETES, Santoso, Soenoko, & Astuti, (2013) | Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Industri Pariwisata Dengan Menggunakan Metode SWOT Dan QSPM (Studi Kasus Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon) | Analisis SWOT dan QSPM | Sektor Pariwisata | Posisi pariwisata di kabupaten Leitimur Selatan dengan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk dan analisis SWOT. |

| | | | | | |
|-----|---|---|--------------------------|---|--|
| 8. | Putri & Fauziah, (2017) | Peran Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Sidoarjo | Analisis Interaktif | 1. Otonomi Daerah 2. Pengembangan Objek Pariwisata | Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah mulai dari menginventarisasi seluruh objek wisata, pembagian wilayah pengembangan pariwisata (WPP), pembuatan fasilitas pelayanan wisata, promosi dan pembangunan sarana objek wisata, memperbaiki seluruh aksesibilitas menuju objek wisata, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). |
| 9. | Fitri, Devilian (2014) | Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pesisir Selatan | Kuantitatif | 1. Sektor Pariwisata 2. PAD | Hasil penelitian menunjukkan Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Sarana akomodasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 10. | Ahmar, A., Nurlinda, N., & Muhani, M. (2016). | Peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palopo | Regresi Linear sederhana | 1. Sektor Pariwisata 2. PAD | Jumlah pendapatan sektor pariwisata mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya disebabkan oleh faktor jumlah wisatawan yang tidak menentu. Koefisien korelasi antara retribusi pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sebesar 70%. Pengaruh ini menunjukkan bahwa diantara kedua variabel memiliki hubungan |

Pada umumnya desentralisasi fiskal membawa lebih banyak keuntungan bagi daerah untuk mengelola kapasitas fiskalnya sendiri sehingga hubungannya terhadap pariwisata dimana memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerah sehingga dapat mendatangkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara maka dari itu nantinya memberikan kontribusi terhadap PAD yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Penelitian yang dilakukan mempunyai keunikan dengan penelitian terdahulu dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju dilihat dari lima tahun terakhir serta variabel yang akan diteliti yaitu pendapatan asli daerah (PAD), aspek ekonomi masyarakat, implementasi kebijakan publik.

H. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini nantinya mencoba memberikan jawaban terkait pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju, sehingga diketahui laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata melalui kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah, serta pengaruh pariwisata terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimana prospek yang dihasilkan pariwisata dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun kerangka pikir peneliti merumuskan sebagai berikut :



Gambar 0.1 Kerangka Pikir